

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- AAGN Ari Dwi Payana, *Membangun Good governance di Desa*. IRE pres. Yogyakarta, 2003.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan 1, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2004.
- Anonimous, *Calon Kepala desa Tak terikat syarat domisili*, Majalah Konstitusi, Nomor 115 September 2016, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016.
- Anonimous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.
- Feri Amsari, *Perubahan UUD 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Finer, Samual Edward. *Comparative Government*, Terjemahan, Ghalia Indonesia, Bandung, 2006.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga, 2011.
- , *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*,. Grasindo, Jakarta, 2005.
- Inu Kencana Syafie, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Islamy, Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*, Bina Aksara, 2003, Jakarta.
- Jabal Tarik Ibrahim, *Sosiologi Pedesaan*. UMM Pres, Malang, 2003.
- Jimmy Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.
- Maruar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mukti fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Pamudji S, *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta, 2006.
- Pranadjaja, Muhamad Rohidin, *Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan*. Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Saparin, *Tata Pemerintahan Dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Ghalia Indonesia, 2007.
- , *Tinjauan Tentang Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Bandiklat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 1976.
- Sekretariat dan Jenderal Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Sutoro Eko, Dkk, *Desa Membangun Indonesia*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) dan ACCESS, Yogyakarta, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Titik Triwulan tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Dan Pemberhentian Keuchik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015

C. Majalah

Anonimous, *Calon Kepala Desa Tak Terikat Syarat Domisili*, Majalah Konstitusi, Nomor 115 September 2016, Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2016.

D. Internet

<http://sekolah-daring.blogspot.co.id/2013/11/pengertian-dan-fungsi-pemerintah-dan.html> diakses pada tanggal 30 Juni 2017

<http://www.anomsuryaputra.id/2016/12/opini-pilkades-pasca-putusan-mk.html> diakses pada tanggal 9 November 2017

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=13268#.WVkWbRXyIU> diakses pada tanggal 20 Juni 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Langsa diakses pada tanggal 20 september 2017

<https://www.kbbi.web.id/calon> diakses pada tanggal 20 september 2017